



Analisis Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Dina Larisma Hotmauli Lumban Gaol¹, Hana Grace², Kayla Adelia³, Putri
Kemala Dewi Lubis⁴, Khairani Alawiyah Matondang⁵

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Negeri Medan

Abstrak

Received: 22 Juli 2026
Revised: 29 Juli 2026
Accepted: 5 Agustus 2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem akuntansi instansi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah melalui pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai artikel ilmiah yang relevan dan telah dipublikasikan pada periode 2021–2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada database jurnal ilmiah seperti Google Scholar dan Sinta, dengan kriteria inklusi berupa artikel yang relevan, telah melalui proses peer-review, dan tersedia dalam bentuk full text. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta kesenjangan dalam penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi instansi pemerintah, khususnya yang berbasis akrual, memiliki peran signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta lemahnya sistem pengendalian internal. Selain itu, ditemukan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan yang menunjukkan perlunya penguatan kapasitas organisasi dan komitmen aparatur. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi teknologi informasi, serta penguatan sistem pengendalian internal agar sistem akuntansi dapat berfungsi secara efektif dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah yang optimal.

Kata Kunci:

Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Keuangan, Transparansi Keuangan, Sistem Akuntansi Berbasis Akrual, Pengelolaan Keuangan Daerah

(*) Corresponding Author:

dinaalhl@gmail.com, hanaghn03@gmail.com,
kaylaadelia312@gmail.com, putrikemala@unimed.ac.id,
alawiyah@unimed.ac.id,

How to Cite: Grace, H., Gaol, D., Adelia, K., Lubis, P., & Matondang, K. (2026). Analisis Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(8.C), 70-82. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13909>.

PENDAHULUAN

Transparansi dan kinerja keuangan merupakan dua aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks sektor publik, transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi keuangan, tetapi juga mencerminkan tingkat akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran publik, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa

transparansi laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik dan kualitas pengelolaan keuangan daerah (Saputri et al., 2024).

Salah satu instrumen penting dalam mendukung transparansi dan kinerja keuangan tersebut adalah sistem akuntansi instansi pemerintah. Sistem akuntansi berfungsi sebagai alat untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan secara sistematis dan terstandar. Penerapan sistem akuntansi yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan. Penelitian menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah (Aprilia et al., 2025).

Namun demikian, implementasi sistem akuntansi instansi pemerintah tidak selalu berjalan optimal. Berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman terhadap standar akuntansi, serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi seringkali menjadi hambatan dalam penerapan sistem tersebut. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas sistem akuntansi sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal yang memadai (Priscilla et al., 2022).

Selain itu, sistem akuntansi instansi pemerintah juga berperan sebagai alat pengendalian internal yang mampu meningkatkan transparansi serta meminimalisir potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem yang terintegrasi akan mempermudah proses audit serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem telah diterapkan, efektivitasnya masih bergantung pada kesiapan organisasi dan dukungan teknologi (Alam et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara sistem akuntansi, transparansi, dan kinerja keuangan. Penelitian oleh (Maria et al., 2025) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis teknologi mampu meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan. Penelitian lain oleh (Surjono & Firdaus, 2021) menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, (Putri & Rahmah, 2023) menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pengendalian internal memperkuat efektivitas sistem akuntansi dalam meningkatkan kinerja keuangan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga belum mampu menggambarkan secara mendalam bagaimana proses implementasi sistem akuntansi instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan kinerja keuangan. Adapun salah satu penelitian kualitatif mengenai topik ini yaitu penelitian oleh (Maharani et al., 2025) yang menjelsakan bahwa SAPP telah meningkatkan kualitas, keterbukaan, dan aksesibilitas laporan keuangan pemerintah, sehingga memperkuat kepercayaan publik dan mekanisme pertanggungjawaban. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem akuntansi instansi dalam meningkatkan transparansi dan kinerja keuangan melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik serta menjadi referensi bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) untuk menganalisis peran sistem akuntansi instansi dalam meningkatkan transparansi dan kinerja keuangan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam berbagai konsep, teori, serta temuan empiris yang telah dipublikasikan dalam penelitian sebelumnya. Melalui studi literatur, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara sistem akuntansi, transparansi, dan kinerja keuangan dalam konteks instansi pemerintah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan terstruktur fenomena yang diteliti berdasarkan hasil kajian literatur. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan, melainkan mengandalkan data sekunder berupa artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, buku referensi, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan sintesis terhadap berbagai hasil penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis pada berbagai sumber, seperti Google Scholar, Sinta, dan portal jurnal ilmiah lainnya. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi “sistem akuntansi instansi”, “transparansi keuangan”, “kinerja keuangan”, dan “akuntansi sektor publik”. Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel yang relevan dengan topik sistem akuntansi dan transparansi/kinerja keuangan; (2) artikel yang diterbitkan dalam rentang tahun 2021–2026; (3) artikel yang telah melalui proses peer-review; serta (4) artikel yang tersedia dalam bentuk full text. Adapun kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak memiliki relevansi langsung dengan topik atau tidak menyediakan data yang memadai.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*). Tahapan analisis dimulai dari membaca dan memahami seluruh literatur yang telah dikumpulkan, kemudian dilanjutkan dengan proses pengkodean untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan implementasi sistem akuntansi, transparansi, dan kinerja keuangan. Selanjutnya, tema-tema tersebut dianalisis secara komparatif untuk menemukan pola, hubungan, serta kesenjangan (*gap*) dalam penelitian sebelumnya. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan terintegrasi.

Untuk menjaga kualitas dan validitas penelitian, dilakukan evaluasi terhadap setiap sumber literatur berdasarkan kredibilitas penulis, relevansi topik, serta kualitas metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut. Selain itu, peneliti juga menerapkan prinsip triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai hasil penelitian dari sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi temuan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memiliki tingkat keandalan yang tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam

pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya terkait peran sistem akuntansi dalam meningkatkan transparansi dan kinerja keuangan.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

No	Judul Artikel	Identitas Artikel	Metode	Hasil Penelitian
1	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas	(Alam et al., 2025)	Kualitatif deskriptif	Implementasi SAKD berjalan cukup baik dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas, namun terkendala SDM dan teknologi
2	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota)	(Demeri et al., 2025)	Kualitatif studi kasus	Transparansi belum optimal, dipengaruhi oleh lemahnya tindak lanjut audit dan keterbatasan sistem informasi
3	Transformasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	(Wardani & Aripriatiwi, 2025)	Kualitatif (literature review)	Sistem akuntansi berbasis akrua meningkatkan kualitas laporan dan akuntabilitas, namun membutuhkan kesiapan SDM
4	Evaluasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat	(Maharani et al., 2025)	Kualitatif (literature review)	Sistem akuntansi meningkatkan transparansi, tetapi implementasi masih belum optimal secara teknis
5	Peran APIP dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah	(Napan et al., 2025)	Kualitatif studi kasus	APIP berperan penting dalam pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pengendalian internal

Pembahasan

Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah

Implementasi sistem akuntansi instansi pemerintah merupakan salah satu aspek fundamental dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini mencakup serangkaian proses yang terintegrasi mulai dari pencatatan transaksi, pengklasifikasian, pengikhtisaran, hingga penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam konteks reformasi keuangan publik di Indonesia,

penerapan sistem akuntansi berbasis akrual menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Sistem berbasis akrual memungkinkan pengakuan transaksi keuangan pada saat terjadinya, bukan hanya saat kas diterima atau dikeluarkan, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah (Setiyana et al., 2025).

Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi instansi pemerintah telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penerapan SAP berbasis akrual terbukti mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, baik dari segi relevansi, keandalan, maupun keterbandingan informasi keuangan antar periode. Penelitian yang dilakukan oleh (Salsabilla et al., 2025) menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi berbasis akrual secara signifikan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan publik, terutama dalam hal akurasi dan kelengkapan informasi yang disajikan. Selain itu, (Wardani & Aripriatiwi, 2025) juga menemukan bahwa reformasi sistem akuntansi publik berkontribusi terhadap peningkatan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mencerminkan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Namun demikian, implementasi sistem akuntansi instansi pemerintah tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun teknis. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas dalam penerapan sistem berbasis akrual, yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap konsep akuntansi serta kemampuan teknis dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan masih menjadi kendala utama dalam implementasi sistem ini (Setiyana et al., 2025). Selain itu, dalam beberapa kasus masih ditemukan adanya praktik pencatatan yang belum sepenuhnya berbasis akrual, yang menunjukkan bahwa proses transisi dari sistem berbasis kas ke akrual belum berjalan secara optimal (Afriyeni et al., 2024).

Lebih lanjut, implementasi sistem akuntansi instansi pemerintah juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan integrasi sistem yang digunakan. Sistem informasi akuntansi yang tidak terintegrasi secara optimal dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan serta meningkatkan risiko kesalahan dalam pengolahan data. Oleh karena itu, digitalisasi sistem akuntansi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas implementasi. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses pelaporan serta kualitas informasi keuangan yang dihasilkan (Salsabilla et al., 2025).

Selain faktor teknis, aspek organisasi dan budaya kerja juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi sistem akuntansi. Implementasi sistem akuntansi tidak hanya membutuhkan perangkat teknologi dan regulasi yang memadai, tetapi juga memerlukan komitmen dari seluruh aparatur pemerintah dalam menjalankan sistem tersebut secara konsisten. Penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan kapasitas kelembagaan merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di sektor publik (Hidayat et al., 2022). Kurangnya komitmen organisasi dan resistensi terhadap perubahan seringkali menjadi hambatan dalam

penerapan sistem baru, terutama dalam konteks reformasi akuntansi berbasis akrual yang menuntut perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, implementasi sistem akuntansi tidak hanya memerlukan reformasi teknologi, tetapi juga penguatan kapasitas kelembagaan serta kesiapan sumber daya manusia agar sistem dapat berjalan secara efektif (Safrizan et al., 2025). Oleh karena itu, implementasi sistem akuntansi harus didukung oleh kepemimpinan yang kuat serta budaya organisasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Secara keseluruhan, implementasi sistem akuntansi instansi pemerintah merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang tidak hanya bergantung pada aspek regulasi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, teknologi, dan organisasi. Keberhasilan implementasi sistem ini akan sangat menentukan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta tingkat akuntabilitas pemerintah kepada publik. Dengan demikian, diperlukan upaya yang berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat sistem pengendalian internal, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi agar sistem akuntansi instansi pemerintah dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung tata kelola keuangan yang baik.

Peran Sistem Akuntansi dalam Akuntabilitas Keuangan

Sistem akuntansi instansi pemerintah memiliki peran yang sangat fundamental dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan, karena sistem ini menjadi dasar utama dalam menghasilkan informasi keuangan yang transparan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam konteks sektor publik, akuntabilitas keuangan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sistem akuntansi berfungsi sebagai alat yang mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari pencatatan transaksi hingga pelaporan, sehingga memungkinkan setiap aktivitas keuangan dapat ditelusuri dan diaudit secara sistematis. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terutama melalui penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu (Marsya et al., 2025).

Lebih lanjut, sistem akuntansi berperan penting dalam meningkatkan transparansi keuangan, yang merupakan salah satu indikator utama akuntabilitas. Melalui sistem akuntansi yang terstruktur, pemerintah dapat menyajikan informasi keuangan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual memungkinkan penyajian informasi yang lebih komprehensif, mencakup seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi keuangan pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi berbasis akrual berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan kualitas laporan keuangan, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Setiyana et al., 2025).

Selain itu, sistem akuntansi juga memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi pengendalian dan pengawasan keuangan. Dengan adanya sistem akuntansi

yang baik, setiap transaksi keuangan dapat terdokumentasi secara jelas, sehingga memudahkan proses audit dan evaluasi oleh pihak internal maupun eksternal. Integrasi antara sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Penelitian oleh menunjukkan bahwa kombinasi antara sistem akuntansi yang efektif dan pengendalian internal yang kuat mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Muslimah et al., 2023).

Di sisi lain, sistem akuntansi juga berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah melalui penyediaan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dapat digunakan oleh pimpinan instansi untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi penggunaan anggaran secara lebih efektif. Dengan demikian, sistem akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen manajerial yang mendukung peningkatan kinerja organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dengan teknologi informasi mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, sehingga berdampak positif terhadap kinerja keuangan instansi pemerintah (Salsabilla et al., 2025).

Namun demikian, peran sistem akuntansi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan tidak dapat terwujud secara optimal tanpa dukungan faktor lain, seperti kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan kesiapan teknologi. Dalam beberapa kasus, meskipun sistem akuntansi telah diterapkan sesuai dengan regulasi, masih ditemukan permasalahan dalam kualitas laporan keuangan akibat kurangnya pemahaman aparatur terhadap sistem yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem akuntansi tidak hanya ditentukan oleh desain sistem itu sendiri, tetapi juga oleh kemampuan dan komitmen pengguna dalam mengimplementasikannya secara konsisten (Safida et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat sistem pengendalian internal, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi agar sistem akuntansi dapat berfungsi secara maksimal dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan (Muslimah et al., 2023).

Secara keseluruhan, sistem akuntansi instansi pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan yang tinggi. Melalui penyediaan informasi keuangan yang transparan, andal, dan relevan, sistem akuntansi mampu meningkatkan kepercayaan publik serta mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang baik. Dengan demikian, penguatan sistem akuntansi harus menjadi prioritas utama dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah, guna memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara optimal kepada masyarakat.

Kendala dalam Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah

Implementasi sistem akuntansi instansi pemerintah dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat kompleks dan multidimensional, baik dari aspek sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan, maupun regulasi. Salah satu kendala utama yang paling dominan adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam memahami dan mengoperasikan sistem akuntansi berbasis akrual. Sistem akuntansi pemerintah yang semakin berkembang menuntut

aparatur untuk memiliki kemampuan teknis yang memadai, namun kenyataannya masih terdapat keterbatasan tenaga akuntansi yang memahami standar akuntansi pemerintahan secara komprehensif. Hal ini berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM merupakan faktor penting yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, di mana rendahnya pemahaman aparatur terhadap sistem akuntansi dapat menyebabkan penyajian laporan yang kurang optimal (Islamiah, 2023).

Selain faktor SDM, keterbatasan infrastruktur dan teknologi informasi juga menjadi kendala signifikan dalam implementasi sistem akuntansi instansi pemerintah. Sistem informasi akuntansi yang belum terintegrasi secara optimal antar unit kerja menyebabkan proses pengolahan data keuangan menjadi kurang efisien serta berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penyajian informasi. Dalam beberapa daerah, implementasi sistem berbasis teknologi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses, kualitas sistem yang belum memadai, serta kurangnya dukungan teknis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kurangnya infrastruktur teknologi informasi menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual, sehingga menghambat efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Matondang et al., 2025).

Kendala berikutnya berkaitan dengan lemahnya sistem pengendalian internal dan fungsi pengawasan dalam organisasi pemerintah. Sistem pengendalian internal yang tidak berjalan secara efektif dapat menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian laporan keuangan, hingga potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kelemahan dalam struktur pengendalian internal, kurangnya koordinasi antar unit kerja, serta rendahnya kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan menjadi faktor yang memperburuk kondisi tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas publik dan kinerja instansi pemerintah, terutama dalam hal keandalan laporan keuangan (Meilisa & Fadli, 2024).

Di samping itu, kompleksitas regulasi dan dinamika kebijakan pemerintah juga menjadi kendala dalam implementasi sistem akuntansi. Perubahan regulasi yang relatif cepat serta kurangnya sosialisasi yang memadai menyebabkan aparatur mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan yang berlaku. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan sistem akuntansi. Penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang kompleks dan kurang sinkron menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi sistem akuntansi pemerintah, sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem (Matondang et al., 2025).

Selain aspek teknis dan regulasi, faktor budaya organisasi dan resistensi terhadap perubahan juga menjadi kendala yang tidak kalah penting. Implementasi sistem akuntansi berbasis akrual dan teknologi informasi menuntut perubahan pola kerja yang signifikan, yang seringkali menghadapi resistensi dari aparatur yang telah terbiasa dengan sistem lama. Kurangnya komitmen organisasi serta rendahnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas juga dapat menghambat keberhasilan implementasi sistem akuntansi. Penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi dan komitmen manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan

implementasi sistem akuntansi sektor publik, terutama dalam mendukung perubahan menuju sistem berbasis akrual (Wardani & Aripriatiwi, 2025). Dalam konteks ini, perubahan sistem tidak hanya memerlukan dukungan teknis, tetapi juga transformasi budaya organisasi yang mendorong transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Secara keseluruhan, kendala dalam implementasi sistem akuntansi instansi pemerintah merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari keterbatasan SDM, teknologi, pengendalian internal, regulasi, hingga budaya organisasi. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kendala tersebut harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem pengendalian internal, penyempurnaan regulasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, sistem akuntansi instansi pemerintah dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan mampu mendukung peningkatan akuntabilitas keuangan daerah secara optimal.

Analisis Kesenjangan dan Upaya Perbaikan

Analisis kesenjangan (*gap analysis*) dalam implementasi sistem akuntansi instansi pemerintah menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara standar normatif yang telah ditetapkan dalam regulasi dengan praktik pelaksanaan di lapangan. Secara normatif, pemerintah Indonesia telah mengadopsi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai ketidaksesuaian yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas organisasi dan kompleksitas implementasi. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem akuntansi berbasis akrual telah diterapkan secara formal, masih terdapat instansi yang belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, terutama dalam hal pengakuan dan pengukuran transaksi keuangan (Setiyana et al., 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesenjangan antara regulasi dan praktik tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh faktor kelembagaan dan sumber daya.

Lebih lanjut, kesenjangan tersebut juga tercermin dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang masih bervariasi, baik dari segi kelengkapan informasi maupun tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi. Penelitian oleh (Wardani & Aripriatiwi, 2025) menunjukkan bahwa meskipun reformasi akuntansi publik telah meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, masih terdapat inkonsistensi dalam implementasi di berbagai instansi pemerintah, yang disebabkan oleh perbedaan kapasitas SDM dan dukungan teknologi. Selain itu, (Maharani et al., 2025) menegaskan bahwa implementasi sistem akuntansi pemerintah masih menghadapi tantangan dalam aspek teknis dan kelembagaan, yang mengakibatkan belum optimalnya pencapaian tujuan akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, kesenjangan yang terjadi bersifat sistemik dan memerlukan pendekatan yang komprehensif dalam penanganannya.

Kesenjangan lainnya juga terlihat pada aspek pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem akuntansi. Meskipun pemerintah telah mengembangkan berbagai aplikasi keuangan daerah, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), implementasinya masih belum merata di seluruh instansi. Hal ini menyebabkan adanya disparitas dalam kualitas informasi keuangan yang

dihasilkan, terutama antara daerah yang telah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai dengan daerah yang masih terbatas. Penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi teknologi informasi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas sistem akuntansi dan kualitas laporan keuangan (Salsabilla et al., 2025). Oleh karena itu, kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi menjadi salah satu isu penting yang perlu segera diatasi.

Untuk mengatasi berbagai kesenjangan tersebut, diperlukan upaya perbaikan yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan dan penggunaan teknologi informasi. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi SDM memiliki dampak positif terhadap kualitas implementasi sistem akuntansi serta akuntabilitas keuangan daerah (Saputri et al., 2024). Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal dan fungsi pengawasan juga menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa sistem akuntansi dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Di samping itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi juga perlu menjadi prioritas dalam upaya perbaikan sistem akuntansi instansi pemerintah. Integrasi sistem informasi keuangan antar unit kerja serta pengembangan aplikasi yang user-friendly dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap instansi memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur teknologi, sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam kualitas pelaporan keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sistem akuntansi mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan secara signifikan (Salsabilla et al., 2025).

Lebih jauh lagi, perbaikan juga perlu dilakukan pada aspek kelembagaan dan budaya organisasi. Komitmen pimpinan serta dukungan manajerial menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi sistem akuntansi. Tanpa adanya komitmen yang kuat, berbagai upaya perbaikan yang dilakukan tidak akan memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan perubahan budaya organisasi yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, konsistensi dalam penerapan regulasi serta peningkatan koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penting dalam mengurangi kesenjangan yang terjadi.

Secara keseluruhan, analisis kesenjangan dalam implementasi sistem akuntansi instansi pemerintah menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai akuntabilitas keuangan yang optimal. Upaya perbaikan harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan berbagai aspek, mulai dari peningkatan kapasitas SDM, penguatan teknologi, perbaikan sistem pengendalian internal, hingga transformasi budaya organisasi. Dengan demikian, sistem akuntansi instansi pemerintah dapat berfungsi secara lebih efektif sebagai instrumen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem akuntansi instansi pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam

meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Sistem akuntansi yang diterapkan secara terstruktur dan berbasis standar akuntansi pemerintahan terbukti mampu menghasilkan informasi keuangan yang lebih transparan, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, khususnya yang berbasis akrual, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Namun demikian, implementasi sistem akuntansi instansi pemerintah belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat kompleks dan multidimensional. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami sistem akuntansi berbasis akrual, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, lemahnya sistem pengendalian internal, serta adanya resistensi terhadap perubahan dalam budaya organisasi. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan praktik implementasi di lapangan, yang menunjukkan bahwa keberhasilan sistem akuntansi tidak hanya ditentukan oleh aspek regulatif, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan komitmen aparatur dalam menjalankannya secara konsisten.

Lebih lanjut, hasil penelitian juga menegaskan bahwa sistem akuntansi instansi pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan kinerja keuangan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Peran sistem akuntansi dalam akuntabilitas keuangan akan semakin optimal apabila didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat, pengawasan yang efektif, serta integrasi teknologi informasi yang memadai. Dengan demikian, sistem akuntansi menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik (*good governance*).

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai kendala dan kesenjangan yang ada. Upaya tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, penguatan sistem pengendalian internal, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan implementasi sistem akuntansi instansi pemerintah dapat berjalan secara lebih efektif dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyeni, P., Zuliyana, S., Asrina, S., & Syaherwandi. (2024). PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(4), 474–485.
- Alam, D. M. P., Tanjung, H., & Sofiani, V. (2025). PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN KECAMATAN

- WARUNGKIARA. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 2439–2448.
- Aprilia, N., Satriawan, I., & Dwitayanti, Y. (2025). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah , Akuntabilitas , dan Penerapan SIPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang. *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(3), 1317–1333.
- Demeri, Nurfitriani, A. F., Amalia, A., Halim, H., & Daryati, Y. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Kasus di Kota Cirebon. *YUME : Journal of Management*, 8(2), 235–240.
- Hidayat, R., Damayanti, R. A., & Darmawati. (2022). Pengaruh Kapasitas Organisasi, Komitmen Organisasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. *Al-Buhuts*, 18(2018), 365–379.
- Islamiah, R. secar. (2023). Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah di skpd berupa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. *Karimah Tauhid*, 2(5), 1802–1806.
- Maharani, A. P., Putri, F. R., Karina, Safitri, R. W., & Meidiyustiani, R. (2025). EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP) DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA. *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 20(10).
- Maria, F., Edison, R., Oematan, H. M., & Nenabu, J. C. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah , Kompetensi Sumber Daya Manusia , dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng. *JUMMA'45: Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 59–71.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.5012>
- Marsya, A. L., Ferawati, I. W., & Wicaksono, B. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Akuisisi : Jurnal Akuntansi*, 21(01), 91–102.
- Matondang, K. A., Saskia, A., Marpaung, K. B., Purba, L. M., & Sirait, K. D. (2025). Tantangan dan Strategi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Pemerintah Pusat dan Daerah. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 3(1), 294–303.
- Meilisa, M., & Fadli. (2024). ANALISIS AKUNTABILITAS PUBLIK PADA KABUPATEN/KOTA PEMERINTAH INDONESIA. *Edunomika*, 08(01), 1–10.
- Muslimah, W., Taufik, T., & Rusli. (2023). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, SISTEM PELAPORAN, DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 18(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.37301/jkaa.v18i1.99>
- Napan, S. A., Lambe, K. H. P., & Patiung, N. (2025). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Peran APIP : Studi di Inspektorat Kabupaten Nabire. *Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)*, 1(2), 205–211.

- Priscilla, D., Taufik, T., & A, A. A. (2022). THE EFFECT OF IMPLEMENTATION OF FINACIAL ACCOUNTING SYSTEM, FINANCIAL REPORT ACCESSIBILITY, INTERNAL CONTROL IMPLEMENTATION AND GOOD GOVERNANCE IMPLEMENTATION TO REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY (Empirical Study on All OPD of Siak Regency). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 180–190.
- Putri, D., & Rahmah, N. A. (2023). Pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi sdm terhadap kualitas LKPD Bandung Barat Sistem Pengendalian Internal. *Journal of Business and Banking*, 13(1), 157–175.
- Safida, M., Murhaban, Naz'aina, & Raza, H. (2023). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah , Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Audit Internal terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe. *JURNAL AKUNTANSI MALIKUSSALEH*, 2(2), 184–201.
- Safrizan, Nawawi, Z. M., & Harmain, H. (2025). IMPLEMENTASI DAN OPTIMALISASI SISTEMAKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAMMENINGKATKAN KUALITAS PELAPORAN PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA BKPSDMKABUPATEN ACEH BARAT DAYA). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)*, 9(2), 249–261.
- Salsabilla, A. N., Sabtara, A. D., Daung, D. A., & Meidiyustiani, R. (2025). IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH: STUDI TINJAUAN LITERATUR IMPLEMENTATION OF ACCRUAL-BASED ACCOUNTING IN GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS: A LITERATURE Pendahuluan. *Al-Ihtiram: Multidisciplinary Journal of Counseling and Social Research*, 4(1), 227–240.
- Saputri, Andriani, & Wulandari. (2024). Pengaruh transparansi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*.
- Setiyana, D., Hananya, A., Dewi, P. K., & Matondang, A. (2025). Implementasi Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia: Systematic Literature Review 2020 – 2025. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 9(1), 1263–1272.
- Surjono, W., & Firdaus, N. R. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 5(1), 1357–1368.
- Wardani, N. P., & Aripriatiwi, R. A. (2025). Transformasi sistem akuntansi publik dan tantangan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *JURNAL AKTUAL AKUNTANSI KEUANGAN BISNIS TERAPAN*, 8(2), 274–284.